



Judul : Ada Peluang Dapat Kuota Penuh, DPR : Diplomasi Haji Kudu Ekstra Keras
Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ada Peluang Dapat Kuota Penuh DPR: Diplomasi Haji Kudu Ekstra Keras

ANGGOTA Komisi VIII DPR KH Bukhori meminta Pemerintah menggenjot diplomasi haji dengan Arab Saudi. Sebab, informasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sudah ada beberapa negara yang angkat tangan karena pelaksanaan biaya haji tahun ini menjadi jauh lebih mahal.

Situasi ini membuat Indonesia menjadi pasar terbaik bersama Malaysia. Perlu kepiawaian Pemerintah dalam berdiplomasi, sehingga Indonesia bisa memberangkatkan jemaah haji tahun ini dengan kuota penuh, bahkan lebih.

"Saya meminta pimpinan mencatat dan diusulkan kepada Pemerintah agar memanfaatkan ini sebagai modal ekstra diplomasi. Jadi, bukan diplomasi yang biasa-biasa saja, tetapi ada ekstra diplomasi," tegas Bukhori dalam rapat kerja bersama BPKH di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Bukhori bilang, diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Arab Saudi lebih menyukai negosiasi langsung secara *person to person*, bukan pendekatan secara struktural. "Karena memang watak Arab itu, ya aturan tidak penting-penting amat," jelasnya.

Bukhori yakin dengan ekstra diplomasi, bisa menekan biaya pelaksanaan sehingga bisa berdampak pada penghitungan Biaya Pengelolaan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2022.

"Kalau tidak berdampak, tentu kita akan sulit untuk menekan Biph (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Walau bisa saja Biph kita jadi kebijakan politik sehingga BPIH membengkak, tapi kan kasian juga," jelasnya.

Dia pun memberikan apresiasi kepada BPKH yang telah melakukan penghematan biaya-biaya haji seperti biaya protokol kesehatan dalam pelaksanaan haji sejak

embarkasi hingga ke Arab Saudi. Skenario dari BPKH ini dibutuhkan dalam konteks memastikan pelaksanaan haji tidak sampai membebani para jemaah.

Walaupun di satu sisi, dia menyayangkan. Kepala BPKH Anggita Abimanyu tidak kembali mencalonkan diri untuk menempati posisi BPKH periode selanjutnya. Masa tugas Anggito es dan kawan-kawan akan berakhir pada pertengahan Juni ini.

"Saya menyayangkan pak Anggito kenapa jadi pandito, padahal sudah berhasil membidangi BPKH dan menyapih. Mudah-mudahan, paling tidak prestasi sekarang menjadi pijakan dan ke depan (BPKH) jauh lebih baik," harapnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang mengapresiasi kinerja Anggito Abimanyu es yang sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa Anggito es sukses meletakkan sistem administrasi pelaporan keuangan secara baik selama menjalankan masa tugasnya.

"Saya pikir inilah nanti yang akan dijadikan landasan untuk anggota berikutnya. Kalau anggota berikutnya tidak bisa melakukan seperti ini, ya berarti gagal. Yang hebat berarti periode ini," katanya.

Hanya saja, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyayangkan belum adanya penyampaian komponen BPIH dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada BPKH. Padahal, penghitungan setiap komponen haji ini ada kebersamaan antara BPKH dan Kemenag.

"Ini Kemenag tiba-tiba menentukan biaya haji. Padahal BPKK menurut pemahaman saya selama ini telah melakukan koordinasi dengan yang ada di Arab Saudi," katanya. ■ KAL